

## PERAN MITRA STRATEGIS INDONESIA DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM LAUT CINA SELATAN

**Jonathan Jacob Paul Latupeirissa<sup>1)</sup>, Ni Ketut Arniti<sup>2)</sup>, Ni Luh Yuni Lestari<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Nasional  
email: [jonathanlatupeirissa@undiknas.ac.id](mailto:jonathanlatupeirissa@undiknas.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Nasional  
email: [ketutarniti@undiknas.ac.id](mailto:ketutarniti@undiknas.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Nasional  
email: [yunilestari@undiknas.ac.id](mailto:yunilestari@undiknas.ac.id)

### ABSTRACT

*The World Maritime Axis Policy for Indonesia is important with a focus on the Indo-Pacific region with maritime cooperation that can continue to be strengthened with other countries in the region, both through ASEAN as a strategic regional organization and cooperation with countries outside ASEAN membership, including India. This research will use qualitative methods. The data in this study will be interpreted and then analyzed using a conceptual framework for securitization. Strategic partnerships provide freedom for Indonesia without being bound by alliance obligations, in which middle-power partners who are regionally relevant and have the same interests can collectively enhance Indonesia's defense capabilities. Deeper strategic partnerships with Japan, India and Australia can then be prospects that deserve further exploration because apart from this, it is a form of arrangement between middle powers countries that have shared values such as democracy, recognizing the importance of maritime security, preventing domination one hegemon in Asia, maintaining the free and open Indo-Pacific (including the security and stability of the South China Sea), respecting the sovereignty of each country, and surviving the vortex of great powers competition, cooperation between partner countries is also under policy principles Free Active and able to meet Indonesia's security needs.*

**Keywords:** *Maritime Security, Strategic Partner, South China Sea*

### ABSTRAK

Kebijakan Poros Maritim Dunia bagi Indonesia menjadi penting dengan fokus di kawasan Indo-Pasifik dengan kerjasama maritim yang bisa terus diperkuat dengan negara-negara lain di kawasan, baik melalui ASEAN sebagai organisasi kawasan yang strategis maupun kerjasama dengan negara di luar keanggotaan ASEAN, termasuk India. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini akan diinterpretasi yang kemudian dianalisis menggunakan kerangka konseptual atas konsep sekuritisasi. Kemitraan strategis memberikan keleluasaan bagi Indonesia tanpa terikat kewajiban aliansi, di mana mitra-mitra middle powers yang relevan secara regional dan memiliki kepentingan yang sama dapat secara kolektif meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia. Kemitraan strategis yang lebih dalam dengan Jepang, India, dan Australia kemudian dapat menjadi prospek yang pantas untuk ditelusuri lebih lanjut, karena selain hal tersebut merupakan bentuk arrangement antara negara-negara middle powers yang memiliki shared values seperti demokrasi, mengakui pentingnya keamanan maritim, mencegah dominasi satu hegemon di Asia, mempertahankan free and open Indo-Pacific (termasuk keamanan dan stabilitas Laut China Selatan), menghormati kedaulatan masing-masing negara, serta bertahan dari arus pusaran great powers competition, kerja sama antara negara-negara mitra juga sesuai dengan prinsip kebijakan Bebas Aktif dan mampu memenuhi kebutuhan keamanan Indonesia.

**Kata Kunci:** Keamanan Maritim, Laut China Selatan, Mitra Strategis

## I. PENDAHULUAN

Bagi Indonesia, kawasan Indo-Pasifik menjadi sebuah konsep wilayah yang melibatkan ASEAN sebagai kawasan yang paling strategis. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyampaikan bahwa sentralitas ASEAN memegang peran penting di kawasan Indo-Pasifik untuk dapat memoderasi kepentingan serta mengakomodasi peran negara anggotanya untuk maju di kawasan (Kementerian Luar Negeri, 2018). Dengan kepentingan Indonesia yang juga menekankan sentralitas ASEAN sebagai media dalam perwujudan tujuan kebijakan luar negerinya, termasuk Poros Maritim Dunia. Menurut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam pertemuan East Asia Summit ke-13 menyatakan pentingnya kerjasama maritim untuk memastikan stabilitas keamanan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sebagai Single Geo-Strategic Theatre (KSP, 2019). Hal tersebut menjelaskan bahwa Kebijakan Poros Maritim Dunia bagi Indonesia menjadi penting dengan fokus di kawasan Indo-Pasifik dengan kerjasama maritim yang bisa terus diperkuat dengan negara-negara lain di kawasan, baik melalui ASEAN sebagai organisasi kawasan yang strategis maupun kerjasama dengan negara di luar keanggotaan ASEAN, termasuk India.

Penelitian-penelitian lain juga memberikan perhatian kepada respons dan strategi yang diambil oleh beberapa negara di luar Asia Tenggara namun memiliki kepentingan dalam kontestasi Laut China Selatan. Ma dan Wills (2016) menjabarkan peta kepentingan negara-negara non-claimant dalam persengketaan wilayah, dan menunjukkan adanya dilema strategis di mana keinginan sebuah negara untuk menjunjung hukum dan norma maritim internasional secara lebih kuat dihalangi oleh kalkulasi jika tindakan semacam itu akan memakan lebih banyak sumber daya dibandingkan dengan hasil yang didapatkan dalam mempengaruhi perilaku China. Mengenai Amerika Serikat, Qingli dan Ramasamy (2020) berargumen bahwa AS selama ini telah menggunakan strategi naming and shaming sebagai rhetorical coercion untuk menekan China dengan hasil yang kurang signifikan dan belum mampu menghentikan laju ekspansi China. Untuk India sendiri, Jawli (2016) mengakui bahwa dalam konsep extended neighborhood India, dominasi China di Laut China Selatan berimplikasi pada penguasaan atas choke point strategis yakni Selat Malaka, dan hal tersebut dapat menghalangi akses India ke Pasifik serta mengancam 'halaman belakang' India secara langsung. Dalam kajiannya, Yoshimatsu (2017) menunjukkan bagaimana Jepang berusaha beradaptasi terhadap strategi China di Laut China Selatan dengan meningkatkan pembentukan institusi multilateral yang dikembangkan dari maritime safety menuju maritime security yang ditujukan terhadap China. Sedangkan untuk Australia, Varrall (2021) memperlihatkan bagaimana Canberra mulai berganti posisi dari yang tadinya alerted menjadi alarmed lewat penilaian ancaman dari China terhadap keamanan nasional Australia dan kekhawatiran terhadap kemampuan negara-negara Kepulauan Pasifik dalam melawan pengaruh China. Dari beberapa literatur tersebut, terdapat kesempatan untuk mencoba menilai lebih jauh geostrategic calculus yang dihadapi Indonesia dan meninjau opsi apa saja yang dimiliki Indonesia ketika harus terlibat dalam kontestasi di Laut China Selatan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Data kepustakaan yang dibutuhkan kemudian dapat dikumpulkan dari artikel jurnal, buku, berita-berita media terkait dalam beberapa tahun terakhir, dan dokumen-dokumen nasional masing-masing negara seperti white paper strategi keamanan, terutama dalam rentang waktu sejak Presiden Xi Jinping mulai berkuasa dari tahun 2013, dan saat dimulainya era kepemimpinan Jokowi di Indonesia sejak tahun 2014 beserta track record kebijakan luar negerinya yang berkaitan dengan Laut China Selatan. Yang akan dicari di sini adalah bentuk-bentuk kerja sama keamanan bilateral, keterkaitan ekonomi dan industri, pernyataan-pernyataan dari pemerintah Indonesia terhadap negara tertentu sejak tahun 2014, tingkat persepsi masyarakat terhadap negara-negara terkait,

dan aktivitas diplomatik atau hubungan eksternal yang dilakukan institusi domestik. Dokumen kenegaraan merupakan data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder merupakan data yang mereferensi maupun yang menganalisis isi dari dokumen primer. Adapun dokumen sekunder yang digunakan bisa dalam bentuk berita, literatur buku, jurnal luar angkasa, dan sejenisnya.

Data dalam penelitian ini akan diinterpretasi yang kemudian dianalisis menggunakan kerangka konseptual atas konsep sekuritisasi. Dalam penulisan ini turut menghadirkan adanya kemungkinan atas formulasi ulang dalam perumusan pertanyaan penelitian. Adapun fase terakhir adalah penulisan penemuan atas hubungan antara variabel dependen terhadap variabel independen. Konsep sekuritisasi dalam bentuk tujuh komponen analisisnya terklasifikasi sebagai variabel. Melalui data yang sudah diperoleh, maka akan dilakukan sebuah interpretasi data. Klasifikasi data yang relevan dengan pertanyaan penulisan akan mempermudah proses analisis data pada bagian analisis konseptual teoritik. Data yang telah diklasifikasi tersebut kemudian akan ditemukan dengan variabel yang hadir pada sekuritisasi. Analisis konseptual akan melihat keterkaitan variabel penelitian dengan data yang digunakan. Hasil dari analisis konseptual mampu memberikan informasi baru yang akan mempengaruhi arah jalannya penelitian ini. Sehingga, adanya perubahan pertanyaan penelitian dan bertambahnya data yang akan dianalisis merupakan sebuah kemungkinan yang akan ditemui. Jika melalui interpretasi data ditemukan sebuah relevansi antara variabel teori dengan data yang digunakan, maka penemuan tersebut akan dituliskan pada bagian penutup dan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Jepang: Jangkar Asia Timur**

Sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, dan pihak yang memiliki kepentingan besar untuk memastikan sea lines of communication yang melewati Laut China Selatan tetap bebas dan terbuka, Jepang telah berusaha membangun kapasitas militer yang mumpuni dalam menjaga wilayah laut teritorial dan berpartisipasi di latihan militer maupun freedom of navigation operations. Hal ini dapat kita lihat dengan meningkatnya kemampuan proyeksi kekuatan Japan Self-Defense Force (JSDF) di berbagai matra. Di darat JSDF membentuk Amphibious Rapid Deployment Brigade (ARDB) sebagai unit elite yang dapat dikerahkan untuk mempertahankan atau merebut pulau-pulau di batas wilayah Jepang (Gady, 2016). Di laut dan udara, akuisisi pesawat tempur siluman F-35A, beserta modifikasi kapal Izumo-class agar mampu mengangkut varian F-35B, menunjukkan upaya peningkatan kapabilitas lintas matra dalam JSDF (Lendon and Wakatsuki, 2018; Osborn, 2021).

Semua ini merupakan respons dari meningkatnya kekuatan China dan ambisi maritimnya di kawasan, tidak hanya di Laut China Selatan, namun juga pulau-pulau di Laut China Timur yang dipersengketakan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kepulauan Senkaku, di mana keputusan China untuk menerapkan Air Defense Identification Zone (ADIZ) serta mengawal kapal-kapal nelayan China ke wilayah yang dipersengketakan bersama kapal Penjaga Pantai dan Angkatan Laut China menimbulkan protes keras dari Jepang (Lendon, 2020; Park, 2013).

Namun, sebagai negara kepulauan yang secara geografis tidak memiliki sumber daya yang banyak, perekonomian Jepang perlu disokong oleh akses energi dan aliran ekspor-impor ke berbagai negara. Visi Jepang berupa 'Free and Open Indo-Pacific' lebih mungkin terwujud apabila mitra-mitranya di Asia Tenggara memiliki kapasitas untuk menghadapi tindakan koersif China di wilayah yang terkontestasi, dan hal itu akan membutuhkan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di kawasan. Untuk Indonesia sendiri, teknologi maritime domain awareness, advanced radars, dan alat-alat surveillance Jepang merupakan komponen penting dalam modernisasi dan akuisisi alutsista, di mana rencana pembelian kapal fregat Mogami-class oleh Prabowo pun menjadi roadmap yang dapat dikejar (Engel, 2021a). Yang pasti, hubungan dekat yang ada saat ini pantas untuk dipertahankan dan dikembangkan lebih jauh

menjadi kemitraan strategis, bahwa sejatinya kedua negara pun saling membutuhkan satu sama lain untuk menghadapi situasi geopolitik yang dinamis saat ini. Jepang dan Indonesia tidak dapat menghadapi tantangan keamanan regional sendirian, dan hubungan yang lebih dalam dapat membawa mutual benefits demi mengamankan kedaulatan dan memberikan leverage pada kapabilitas kedua negara.

### **India: Jangkar Samudra Hindia**

Dalam beberapa tahun terakhir, India telah berusaha meningkatkan kapabilitas dan menjaga dominasinya di Samudra Hindia dan Asia Selatan demi menghadapi pengaruh China yang mulai memasuki wilayah yang selama ini menjadi ‘halaman belakang’ India. Sekarang ini, India merupakan salah satu dari lima negara pengimpor senjata terbesar di dunia. Sebut saja akuisisi pesawat tempur Dassault Rafale sebanyak 36 unit, pesawat AEW&C yang menggabungkan sistem radar EL/W-2090 Phalcon milik Israel dengan platform Beriev A-50 milik Rusia, serta helikopter angkut Boeing CH-47 Chinook dan helikopter serang AH-64 Apache buatan AS (Pandit, 2020; Pubby, 2018; Vaid, 2022).

Sebagai kekuatan regional yang juga memiliki ambisi sebagai great power, tentunya India tidak bisa tinggal diam apabila China terus mengancam sphere of influence tradisional mereka. Apalagi jika kita melihat posisi India sebagai ekonomi terbesar keenam (2,9 triliun dolar) dan anggaran pertahanan ketiga terbesar (72,9 miliar dolar) persis di bawah China, yang membuat India berniat mengejar kapabilitas China sekaligus mempertahankan otonomi dan pengaruhnya di kancah perpolitikan global (IMF.org, 2021; Lopes da Silva et al., 2021).

India sebagai salah satu operator terbanyak pesawat P-8 Poseidon, sebuah maritime patrol aircraft (MPA) yang juga digunakan AS dan sekutunya, serta pesawat AEW&C Phalcon, memiliki kemampuan yang sesuai untuk mengawasi aktivitas maritim dan udara di Laut China Selatan, yang mana hal tersebut dapat menutup capability gap Indonesia yang masih kekurangan platform ISR jarak jauh dan modern (Vavaseur, 2021). Selain itu, jika negara-negara semacam Vietnam atau Filipina pun dapat menjalin hubungan dekat dan mendapatkan akses teknologi, lantas kenapa Indonesia, negara yang bisa dianggap pemimpin de facto Asia Tenggara, masih belum menjalin kemitraan strategis lebih dalam dengan kekuatan regional yang krusial seperti India? Bayangkan potensi kerja sama dengan India yang bisa didapatkan Indonesia. TNI AL, AU, dan Bakamla mampu menerima data intelijen dan pengintaian hasil citra satelit India yang mengawasi Laut China Selatan. Jangkauan ISR maritim maupun udara Indonesia pun bisa meningkat dengan bantuan patroli P-8 Poseidon yang mampu mengawasi dan melacak aktivitas kapal perang dan kapal selam China, dan kapabilitas AEW&C Phalcon dapat membantu mengkoordinasi aset udara Indonesia dan India untuk mendeteksi dan mencegah pesawat tempur China yang melakukan intrusi ke wilayah udara Indonesia.

Rencana Prabowo untuk membeli Rafale pun dapat memberikan kesempatan Indonesia untuk ikut berbagi pengalaman dengan India sebagai sesama pengguna, belum lagi mencakup beberapa platform udara lain yang sama-sama digunakan angkatan udara kedua negara seperti Sukhoi Su-30 buatan Rusia. Terdapat potensi untuk meningkatkan interoperabilitas aset-aset India dan Indonesia, baik melalui peningkatan kerja sama logistik, pertukaran perwira, hingga latihan tempur bersama yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi kedua negara di wilayah Laut China Selatan.

Yang jelas, potensi kemitraan strategis dengan India tidak dapat dilewatkan oleh Indonesia. Kedua negara perlu memperkuat historical link yang ada dan mbingkai kemitraan sebagai bentuk kerja sama antara dua kekuatan regional yang memiliki niat memodernisasi angkatan tempurnya, menghormati peran dan posisi masing-masing dalam politik internasional, serta berkomitmen mencegah dominasi hegemon regional yang mengancam kedaulatan dan stabilitas Indo-Pasifik.

### **Australia: Jangkar Oseania**

Sebagai kekuatan regional yang juga menganggap stabilitas Indo-Pasifik krusial, Australia dalam beberapa tahun terakhir juga berusaha meningkatkan kapabilitas pertahanannya. Ini dilakukan sebagai respons terhadap berkembangnya kemampuan militer China dalam memproyeksikan kekuatannya di wilayah Indo-Pasifik dan memodernisasi alutsista yang mampu menyaingi negara-negara maju lainnya.

Selain melakukan akuisisi dan modernisasi alutsista, Australia juga mengakui bahwa kepentingan nasionalnya juga tidak bisa dipisahkan dengan keamanan regional, di mana dibutuhkan mitra yang kuat dan berkomitmen untuk membantu Australia pula. Perhatian tersebut menjadi faktor penting yang mendorong Australia mengejutkan negara-negara tetangganya dengan membentuk pakta pertahanan AUKUS bersama AS dan Britania Raya (Ward and McLeary, 2021).

Australia akan mendapatkan kapabilitas unik yang sejauh ini hanya dimiliki lima negara anggota permanen DK PBB plus India. Kapal selam bertenaga nuklir dapat bergerak lebih cepat, lebih sulit dideteksi, menyelam lebih lama, beroperasi lebih jauh, mampu menembakkan misil, dan juga membawa lebih banyak suplai dibanding kapal selam konvensional, sebuah kemampuan yang bagi Australia krusial demi menghadapi situasi strategis Indo-Pasifik saat ini (BBC News, 2021). Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip non-proliferasi nuklir dan khawatir akan perlombaan senjata regional pun juga angkat bicara akan situasi ini, dengan Menlu Retno yang mengungkapkan kekhawatirannya ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne pada November 2021 lalu (CNN Indonesia, 2021). Akan tetapi, meskipun Australia secara implisit menyatakan bahwa eksistensi AUKUS merupakan counter terhadap aktivitas China, beberapa pengamat melihat bahwa respons Indonesia terhadap AUKUS cenderung lebih vokal ketimbang, misalnya, upaya China mengembangkan misil hipersonik berhulu ledak nuklir, sebuah senjata strategis yang jauh lebih mengancam stabilitas dan perdamaian regional (Engel, 2021b).

Sebagai sesama jangkar strategis di kawasan masing-masing, Indonesia di Asia Tenggara dan Australia di Oseania, sepatutnya kedua negara memupuk hubungan yang sudah ada dan membangun kanal-kanal kemitraan strategis di bidang lainnya. Baik Indonesia dan Australia telah berkomitmen dalam Comprehensive Strategic Partnership yang meliputi pilar-pilar seperti pembangunan ekonomi, konektivitas, kepentingan bersama sekaligus regional, kerja sama maritim, serta berkontribusi dalam keamanan dan kesejahteraan Indo-Pasifik. Kedua negara juga berusaha menghubungkan ekonominya lewat Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Sejauh ini memang sudah terdapat upaya untuk memperkuat hubungan diplomatik kedua negara, seperti dengan latihan-latihan militer berupa Exercise Wirra Jaya, Exercise Cassowary, dan Exercise Pitch Black yang melibatkan matra darat, laut, dan udara kedua negara. Namun kerja sama militer bisa ditingkatkan, seperti dengan menyelenggara-kan latihan lintas matra, terutamanya laut dan udara, serta meningkatkan interoperabilitas militer dalam skenario-skenario konflik potensial di Laut China Selatan. Kerja sama pertahanan kedua negara harus diarahkan menjadi aset keamanan dan stabilitas regional, terlebih lagi dalam domain maritim. Bentuk-bentuk relasi bilateral, seperti edukasi dan pertukaran perwira, perencanaan logistik, dialog dan seminar, hingga di bidang maritime surveillance dan maritime intelligence, bisa lebih menekankan pada tantangan maritim bersama (Laksmana, 2018). Yang jelas, dalam usaha meningkatkan kapabilitas pertahanan, kemitraan strategis yang berfokus pada shared maritime values bersama Australia merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan Indonesia.

#### IV. SIMPULAN

Aktivitas dan militerisasi yang dilakukan China demi memperkuat klaimnya atas Laut China Selatan menjadi kian intensif sejak Xi Jinping memimpin. Meskipun Indonesia secara

teknis adalah non-claimant states, namun klaim China yang beririsan dengan Laut Natuna Utara, serta intrusi yang dilakukan nelayan-nelayan China untuk mencari ikan secara ilegal di wilayah Indonesia, yang sering kali juga dikawal oleh kapal-kapal penjaga pantai hingga kapal perang angkatan laut China, tidak hanya menjadi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, namun juga stabilitas dan keamanan regional. Kemitraan strategis memberikan keleluasaan bagi Indonesia tanpa terikat kewajiban aliansi, di mana mitra-mitra middle powers yang relevan secara regional dan memiliki kepentingan yang sama dapat secara kolektif meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia.

Antara Indonesia dan Australia sendiri, sejatinya banyak kepentingan yang beririsan, dan meskipun hubungan kedua negara tidak senantiasa dekat, baik Indonesia dan Australia menyadari bahwa keamanan jangka panjang satu negara juga bergantung pada stabilitas negara satunya. Yang jelas, bagaimana Australia sejauh ini berhasil untuk mengambil sikap dan meningkatkan kapasitas pertahanan mereka ketika harus berhadapan dengan intimidasi China, memberikan celah bagi Indonesia untuk menempatkan diri dan turut mendapatkan manfaat pertahanan dari kebijakan Australia. Kesempatan untuk menjalin kemitraan strategis dengan Jepang, India, dan Australia merupakan sesuatu yang tidak boleh dilewatkan. Melalui kemitraan strategis, Indonesia dapat tetap melaksanakan politik luar negeri Bebas Aktif sembari memenuhi kebutuhan keamanan demi menghadapi ancaman regional. Kemitraan strategis yang lebih dalam dengan Jepang, India, dan Australia kemudian dapat menjadi prospek yang pantas untuk ditelusuri lebih lanjut, karena selain hal tersebut merupakan bentuk arrangement antara negara-negara middle powers yang memiliki shared values seperti demokrasi, mengakui pentingnya keamanan maritim, mencegah dominasi satu hegemon di Asia, mempertahankan free and open Indo-Pacific (termasuk keamanan dan stabilitas Laut China Selatan), menghormati kedaulatan masing-masing negara, serta bertahan dari arus pusaran great powers competition, kerja sama antara negara-negara mitra juga sesuai dengan prinsip kebijakan Bebas Aktif dan mampu memenuhi kebutuhan keamanan Indonesia.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu serta berkerjasama dalam melaksanakan proses penelitian ini sehingga penelitian ini selesai tepat waktu.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- ABC News, 2021. "A minor face-off": Indian and Chinese troops clash in disputed area of border. ABC News.
- Altenburg, T., 2008. The rise of anchor countries: A New Global Shift challenging economic geography. *Z. Für Wirtsch.* 52, 1–3. <https://doi.org/10.1515/zfw.2008.0001>
- Altenburg, T., Leininger, J., 2008. Global shifts caused by the rise of anchor countries. *Z. Für Wirtsch.* 52, 4–19. <https://doi.org/10.1515/zfw.2008.0002>
- Ardika, I.W., Bellwood, P., 1991. Sembiran: the beginnings of Indian contact with Bali. *Antiquity* 65, 221–232. <https://doi.org/10.1017/S0003598X00079679>
- Associated Press, 2022. China has fully militarized three islands in South China Sea, US admiral says. *The Guardian*.
- Aulia, D.D., 2021. Pengamat Militer Puji Diplomasi Prabowo Perkuat Alutsista TNI [WWW Document]. *detiknews*. URL <https://news.detik.com/berita/d-5851327/pengamat-militer-puji-diplomasi-prabowo-perkuat-alutsista-tni> (accessed 12.23.21).

- Baker, B.D., 2016. What Does Australia's Defense White Paper Actually Say? [WWW Document]. URL <https://thediplomat.com/2016/03/what-does-australias-defense-white-paper-actually-say/> (accessed 12.10.19).
- BBC News, 2021. Aukus: UK, US and Australia launch pact to counter China. BBC News. BBC News, 2019. India Pakistan: Kashmir fighting sees Indian aircraft downed. BBC News. Bhattacharjee, S., 2022. Third Arihant class submarine quietly launched in November. The Hindu. Bland, B., 2021. If the U.S. Is Serious About China Competition, It Needs Indonesia. N. Y. Times.
- Gady, F.-S., 2018. China's 1st Carrier Strike Group Reaches Initial Operational Capability. URL <https://thediplomat.com/2018/06/chinas-1st-carrier-strike-group-reaches-initial-operational-capability> (accessed 11.30.21).
- Gady, F.-S., 2016. Japan's Elite Amphibious Assault Force Trains With US Marines [WWW Document]. The Diplomat. URL <https://thediplomat.com/2016/01/japans-elite-amphibious-assault-force-trains-with-us-marines/> (accessed 1.11.22).
- Gardner, P.F., 1997. Shared Hopes, Separate Fears: Fifty Years Of U.S.-Indonesian Relations. University of Pennsylvania Press.
- Gebauer, L., 2022. U.S., Japan, Australia Conduct Trilateral Naval Training in South China Sea [WWW Document]. US Pac. Fleet. URL <https://www.cpf.navy.mil/News/Article/2969894/us-japan-australia-conduct-trilateral-naval-training-in-south-china-sea/> (accessed 3.23.22).
- Gerstl, A., Strašáková, M., Andělová, P. (Eds.), 2017. Unresolved border, land and maritime disputes in Southeast Asia: bi- and multilateral conflict resolution approaches and ASEAN's centrality, Studies on East Asian security and international relations. Brill, Leiden; Boston.
- Graham, E., 2020. Australia's serious strategic update [WWW Document]. IISS. URL <https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/07/apacific-australia-defence-update> (accessed 1.20.22).
- Gupta, S., 2021. Navy to get aircraft carrier Vikrant, missile destroyer Visakhapatnam in 2021 [WWW Document]. Hindustan Times. URL <https://www.hindustantimes.com/india-news/navy-to-get-aircraft-carrier-vikrant-missile-destroyer-visakhapatnam-in-2021-101619498533809.html> (accessed 1.16.22). 39
- Habib, T., 2021. Maung Pindad hingga Airbus, Ini Deretan Alutsista Hasil Belanja Prabowo [WWW Document]. akurat.co. URL <https://akurat.co/maung-pindad-hingga-airbus-ini-deretan-alutsista-hasil-belanja-prabowo> (accessed 12.23.21).
- Haver, Z., 2021. Japan Latest Nation to Contest Beijing's South China Sea Claims [WWW Document]. VOA. URL [https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific\\_japan-latest-nation-contest-beijings-south-china-sea-claims/6201116.html](https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_japan-latest-nation-contest-beijings-south-china-sea-claims/6201116.html) (accessed 1.11.22).
- Holbraad, C., 1984. Middle Powers in International Politics. Palgrave Macmillan UK, London. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-06865-4>
- Hollingsworth, J., Kwok, J., 2019. Why China is challenging Australia for influence over the Pacific Islands [WWW Document]. CNN. URL <https://www.cnn.com/2019/07/22/asia/china-australia-pacific-investment-intl-hnk/index.html> (accessed 3.23.22).
- Hurst, D., 2021. RAAF signed off on \$16bn F-35 fighter program despite 'deficiencies' with aircraft, audit reveals. The Guardian.

- IDN Financials, 2021. Japanese Brands Rule Indonesian Car Market [WWW Document]. IDN Financ. URL <https://www.idnfinancials.com/insights/japanese-brands-rule-indonesian-car-market> (accessed 1.13.22).
- IMF.org, 2021. World Economic Outlook Database. International Monetary Fund. Japan Times, 2020. Japan offers Indonesia ¥50 billion loan to fight COVID-19 [WWW Document]. Jpn. Times. URL <https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/20/national/yoshihide-suga-indonesia/> (accessed 1.13.22).
- Jawli, N., 2016. South China Sea and India's Geopolitical Interests. *Indian J. Asian Aff.* 29, 85–100. Kamasu, F., 2017. ASEAN Centrality in Asian Regional Architecture. *Glob. South Rev.* 1, 63. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28821>
- Pradhan, S.D., 2021. India and Vietnam: Strengthening of defence relations. *Times India*. Primasiwi, A., 2020. Bakamla RI Tukar Informasi dengan Japan Coast Guard [WWW Document]. *Suara Merdeka*. URL <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04149216/bakamla-ri-tukar-informasi-dengan-japan-coast-guard> (accessed 1.13.22). Pubby, M., 2018. Here is why Apache and Chinook helicopters are game changers for India. *Econ. Times*.
- Putri, V.K.M., 2021. Mutual Security Act, Penyebab Kejatuhan Kabinet Sukiman [WWW Document]. KOMPAS.com. URL <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/22/155854169/mutual-security-act-penyebab-kejatuhan-kabinet-sukiman> (accessed 1.10.22). Qingli, W.H., Ramasamy, H., 2020. Naming and Shaming China: America's Strategy of Rhetorical Coercion in the South China Sea. *Contemp. Southeast Asia* 42, 317–345.
- Rahmat, B., 2016. ASEAN Serukan Kesatuan dan Sentralitas Hadapi Tantangan [WWW Document]. CNN Indones. URL <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160229034849-106-114127/asean-serukan-kesatuan-dan-sentralitas-hadapi-tantangan> (accessed 12.31.21).
- Russel, D., Locklear, S., 2020. China Is Weaponizing the Belt and Road. What Can the US Do About It? [WWW Document]. *The Diplomat*. URL <https://thediplomat.com/2020/10/china-is-weaponizing-the-belt-and-road-what-can-the-us-do-about-it/> (accessed 1.5.22).
- Saha, P., Bland, B., Laksmana, E.A., 2020. Anchoring the Indo-Pacific: the case for deeper Australia-India-Indonesia trilateral cooperation. *Observer Research Foundation*, New Delhi, India.
- Sarlin, B., Kapur, S., 2021. Why China may be the last bipartisan issue left in Washington [WWW Document]. NBC News. URL <https://www.nbcnews.com/politics/congress/why-china-may-be-last-bipartisan-issue-left-washington-n1261407> (accessed 1.4.22).
- Zuhad, A., 2021. Minim Alutsista untuk Amankan Laut Natuna Utara: Butuh 8 KRI, TNI AL Hanya Punya 5 Kapal Perang [WWW Document]. KOMPAS.tv. URL <https://www.kompas.tv/article/213043/minim-alutsista-untuk-amankan-laut-natuna-utara-butuh-8-kri-tni-al-hanya-punya-5-kapal-perang> (accessed 11.30.21).